



# Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden

Foundation the Dutch Debt of Honor Committee

Jeffry M. Pondaag  
Vroegeling 3  
1964 KP Heemskerk  
[jeffry@kukb.nl](mailto:jeffry@kukb.nl)

## Siaran Pers: Pengadilan Tinggi Amsterdam mengabaikan argumen K.U.K.B. dalam 'Kasus Bersiap' melawan Rijksmuseum

Heemskerk, 8 januari 2023 <https://kukb.nl/siaran-pers-pengadilan-tinggi-amsterdam-mengabaikan-argumen-k-u-k-b-dalam-kasus-bersiap-melawan-rijksmuseum/>

Pada hari Kamis 5 Januari, Pengadilan Amsterdam menerbitkan putusan dalam perkara hukum Yayasan K.U.K.B. melawan Rijksmuseum. Putusannya: Pengaduan yayasan ditolak.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan mengabaikan sama sekali dalil-dalil substantif K.U.K.B. terhadap penggunaan istilah 'bersiap'. Para hakim menyatakan bahwa mereka mengikuti alur berpikir Rijksmuseum dan bagaimana Rijksmuseum menafsirkan istilah tersebut, namun mereka tidak menjelaskan alasannya. Putusan tersebut tidak memberikan alasan yang tepat yang mendasarkan mengapa para hakim memilih untuk mengabaikan argumen yang dikemukakan K.U.K.B. dalam persidangan 13 Oktober 2022. Menurut pengadilan, konsep 'bersiap' tidak mengandung pengertian negatif mengenai bangsa Indonesia sebagai kelompok yang mendasarkan pada ras. Menurut Jaksa Penuntut Umum Belanda maupun Pengadilan Amsterdam mengklaim bahwa istilah 'bersiap' hanya digunakan "untuk menunjuk satu periode tertentu dalam sejarah."

Namun, posisi yayasan K.U.K.B. adalah bahwa periode Bersiap – dalam arti peristiwa yang berdiri sendiri dalam periode tertentu, periode kekerasan sepihak yang dilakukan terhadap penjajah – tidak ada, dan bahwa keseluruhan konsep tersebut adalah rekayasa Belanda dan ekspresi rasisme terhadap bangsa Indonesia. Karena putusan pengadilan tidak memiliki alasan yang kuat, yayasan merasa pengaduan mereka tidak ditanggapi dengan serius oleh pengadilan, Ketua Yayasan Jeffry Pondaag mengatakan: "Pengadilan membeo Jaksa Penuntut Umum. Sejujurnya, saya tidak berharap banyak dari para hakim kulit putih ini yang telah menyerap (menjiwai) ide-ide kolonial sejak usia sangat muda."

Tahun lalu, pada Januari 2022, yayasan K.U.K.B. melaporkan Rijksmuseum ke polisi, termasuk direktur dan kuratornya, karena menggunakan istilah Bersiap dalam pameran Revolusi. Pameran tersebut berfokus pada Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) yang berlangsung dari Februari hingga Juni 2022. Jaksa Penuntut Umum Belanda menolak kasus tersebut, setelah itu K.U.K.B. mengajukan pengaduan melalui prosedur hukum khusus. Selama persidangan di bulan Oktober, Pondaag dibantu oleh Dida Pattipilohy dan sejarawan Marjolein van Pagee, yang mempertahankan kasus tersebut di pengadilan.

K.U.K.B. stichting gevestigd te Vroegeling 3 1964 KP Heemskerk, Nederland.

[www.kukb.nl](http://www.kukb.nl) T. +31 (0) 6 38613795 [jeffry@kukb.nl](mailto:jeffry@kukb.nl)

Rekeningnummer 13.19.28.341 Heemskerk (Rabobank). IBAN NL57 RABO 0131 9283 41. BIC (Swift) RABONL2U.  
Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr. 34271716.



## Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden

Foundation the Dutch Debt of Honor Committee

Sebelum pameran dilaksanakan, kurator pameran Harm Stevens dan direktur Dibbits diinformasikan terkait dengan penafsiran kata Bersiap dalam bahasa Belanda. Pada bulan Juni 2021, Yayasan K.U.K.B. hadir dalam sebuah pertemuan di Rijksmuseum, yang membahas rencana pameran Revolusi secara detail.

Selain itu, pada bulan Januari 2022, menjelang pembukaan pameran, kurator tamu dari Indonesia, Bonnie Triyana, menuliskan sebuah opini untuk surat kabar harian NRC yang menjelaskan bahwa istilah 'bersiap' adalah rasis. Opini Bonnie, menimbulkan perdebatan pro kontra, setelah itu direktur Dibbits secara terbuka menjaga jarak dari opini tersebut, dia tetap bertahan atas pendapatnya bahwa istilah 'bersiap' bukanlah rasis.

Jeffry Pondaag menjelaskan "Bersiap, sebagaimana digunakan oleh Belanda, adalah penyalahgunaan istilah dalam bahasa Indonesia. Bagi orang Indonesia, istilah kata tersebut adalah kata yang biasa digunakan sebagaimana kata-kata lainnya. Penting untuk digaris bawahi bahwa Belanda yang tinggal selama 350 tahun di Indonesia tetapi tidak mampu berbicara bahasa Indonesia. Dengan menyalahgunakan kata 'bersiap', mereka mengubah arti kata yang asli menjadi makna lain yang membuat Indonesia menjadi buruk". Pondaag menegaskan, yayasan tidak menganjurkan penghapusan kata tersebut karena merupakan kata yang netral dalam bahasa Indonesia, namun ia tentang secara khusus makna yang dilekatkan oleh Belanda pada kata tersebut, yang tak lain adalah rasisme.

Pada saat sidang pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum Belanda mengakui bahwa topik 'bersiap' dapat berdampak emosional bagi orang Indonesia, tapi menurut hukum pidana Belanda itu tidaklah menyinggung seluruh orang Indonesia berdasarkan ras. Argumentasi yang sama persis, digunakan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan banding mereka.

Baik pengadilan tinggi maupun Jaksa Penuntut Umum memilih untuk membela Rijksmuseum dan tak ada satupun dari mereka yang menanggapi penjelasan sejarah dan dasar hukum yang disampaikan K.U.K.B dan sejarawan Marjolein van Pagee. Pondaag mengatakan: "Belanda membanggakan diri sebagai negara hukum yang demokratis, tetapi yang saya lihat adalah orang kulit putih saling melindungi dan mengabaikan apa yang disampaikan oleh orang Indonesia."

---

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami di: +31638613795 atau +6282114522199

Siaran Pers kami sebelumnya terkait masalah ini:

<https://historibersama.com/k-u-k-b-reports-rijksmuseum-to-the-police/?lang=id>

<https://historibersama.com/amsterdam-court-of-appeal-receives-complaint-by-k-u-k-b/?lang=id>



## Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden

Foundation the Dutch Debt of Honor Committee

### Gugatan Ketua K.U.K.B. Jeffry Pondaag, Amsterdam, 13 Oktober, 2022

Yang terhormat para penasihat hukum

Saya senang berdiri di sini di depan para penasihat hukum, orang pribumi Belanda kulit putih. Selama 350 tahun sistem penjajahan yang rasis, kami (orang Indonesia) tak punya hak apa pun. Ini situasi yang mendesak yang membuat saya memutuskan untuk melaporkan direktur dan kurator Rijksmuseum ke polisi. Belanda, zaman penjajahan itu salah, titik. Istilah ciptaan Belanda 'bersiap' itu tidak ada. Kami selalu 'bersiap' selama 350 tahun untuk mempertahankan diri kami terhadap Belanda dan kaki tangannya yang haus darah. Coba lihat perang Aceh dan Jawa. Belanda dan kaki tangannya katanya membawa peradaban, tidak, mereka haus darah.

Saya adalah kuli pabrik dan saya tak ingin menyinggung siapa pun. Saya hanya ingin menjelaskan fakta apa adanya. Saya mengenyam pendidikan di Indonesia. Yayasan K.U.K.B. mengajukan sejumlah kasus ke pengadilan terhadap negara Belanda, dan kita menang. Banyak korban di Indonesia yang saya ajak bicara, yang ayahnya dieksekusi dan dibunuh oleh tentara kolonial Belanda (KNIL), menunjuk kulitnya dan mengatakan 'itu orang kita'. Belanda bahkan tak tahu perbedaan antara orang Indonesia dengan orang Hindia-Belanda.

Di samping itu, saya melihat bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat ceroboh karena nama Yayasan saya salah eja, tak hanya sekali tapi beberapa kali yang ditulis K.B.U.B.

Identitas 'Hindia Belada' adalah buatan yang berhubungan dengan 3 lapis sistem rasis dan diskriminatif. 350.000 orang yang bermigrasi ke Belanda di tahun 1950an adalah mereka yang memilih berpihak pada penjajah. Mereka adalah pengkhianat yang mengeksekusi saudara-saudarinya sendiri atas nama kerajaan Belanda. Belanda bersalah karena memalsukan sejarahnya dengan tidak memasukkan ini dalam pendidikan. Apakah Jaksa Penuntut Umum pernah melihat gambar di Kereta Emas khususnya di sisi sebelah kanan? Itu adalah penghinaan besar bagi kita orang Indonesia.

Setiap hari Senin kita harus tetap 'bersiap' di sekolah untuk upacara menaikkan bendera merah putih. Setelah itu, kita jalan 'bersiap' dalam dua baris menuju ke ruang kelas. Begitu juga, di hari Jumat, ketika bendera merah putih diturunkan. Keputusan Anda untuk tidak menuntut T. Dibbits dan H. Stevens membuktikan bahwa Belanda melegalkan penjajahan.

Belanda mengabaikan 70 sampai 100 juta orang yang mempertahankan negara mereka dan berpura-pura bahwa mereka tidak ada. Penafsiran Belanda tentang 'bersiap' dibuat oleh orang Hindia-Belanda yang secara legal berasimilasi. Hindia dibuat di Belanda.



## Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden

Foundation the Dutch Debt of Honor Committee

### Gugatan Jeffry Pondaag

Pada Maret 1942, dalam waktu 3 hari, Belanda ditaklukkan oleh Jepang yang datang dengan naik sepeda. Setelah itu, Belanda ingin kembali menjajah kita lagi. Apakah mereka benar-benar berharap kita menyambut mereka dengan tangan terbuka? Belanda adalah pecundang yang buruk! Kami adalah manusia dengan darah dan daging, seperti kita semua yang hadir di sini di pengadilan Amsterdam, dan itulah kenapa kita ingin diperlakukan sama.

Saya tak setuju dengan Jaksa Penuntut Umum. Istilah 'bersiap' yang digunakan Jaksa Penuntut Umum itu tidak ada! Paman saya, yang belum pernah saya jumpai, telah dieksekusi karena dia punya peta yang mengandung informasi tentang lokasi penyimpanan logistik. Dia dibunuh karena dia tidak mau memberikan peta itu.

Dengan mendesak, kiranya saya memohon pengadilan Amsterdam untuk melakukan penuntutan terhadap T. Dibbits dan H. Stevens.

Menurut saya, mereka bersalah karena rasis!

Terima kasih banyak.

---

### Gugatan Dida Pattipilohy, waktu 13 Oktober 2022 dia sekretaris Yayasan K.U.K.B.

Saya adalah warga negara Belanda dari keturunan orang Indonesia. Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Di tahun 1945, PBB mengeluarkan piagam yang di dalamnya mencakup penentuan nasib sendiri sebagai hukum bagi semua bangsa. Ini membuka jalan bagi negara bekas jajahan untuk merebut kemerdekaan dari penjajahnya. Apalagi, PBB juga melabeli kolonialisme atau penjajahan sebagai kejahatan kemanusiaan. Sepenuhnya sesuai dengan Piagam PBB, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sebagai negara kesatuan dengan nama Republik Indonesia, yang dipimpin oleh presiden. Konon, peristiwa ini menandai berakhirnya masa penjajahan. Sayangnya, Pemerintah Belanda merasa perlu untuk mengamankan kepentingannya di timur, yang diikuti dengan banyak kekerasan.

Di Indonesia, 'masa bersiap' itu tidak ada dalam historiografi kami. Istilah 'bersiap' digunakan sebagai slogan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia saat itu, untuk mengekspresikan kesiapan mempertahankan diri terhadap Belanda, yang tak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin menjajah kembali. Sehingga ini membuat pekikan kesetiaan pada kemerdekaan Republik Indonesia. Penggunaan istilah ini yang menunjuk pada masa perlawanan terhadap Belanda mengabaikan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia sudah dilakukan sejak lama. Selain itu, penggunaan istilah ini memberikan kesan ada dua pihak yang saling berhadapan satu sama lain.



## Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden

Foundation the Dutch Debt of Honor Committee

### Gugatan Dida Pattipilohy

Penyetaraan relasi kuasa dua pihak ini juga bertujuan untuk memperhalus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda.

Tentu saja, Belanda menolak untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan memutuskan untuk merebut kembali tanah air jajahan dengan kekerasan. Di awal 1946, Belanda kembali menginvasi Indonesia dengan kekuatan militer yang besar. Indonesia mempertahankan dirinya dari invasi Belanda. Pejuang kemerdekaan Indonesia telah melawan sejumlah usaha Belanda untuk menjajah kembali. Belanda tak punya hak apa pun untuk bertindak di wilayah otoritas Indonesia.

Sebagaimana disebutkan oleh Marjolein van Pagee dan Jeffry Pondaag, Rijksmuseum telah mengundang sekelompok orang (Jeffry Pondaag, Marjolein van Pagee, Francisca Pattipilohy dan saya) untuk memberikan masukan bagi pameran REVOLUSI. Dalam pertemuan itu, kami dengan tegas menyatakan bahwa konsep 'bersiap' tidak masuk dalam pameran.

Menurut sejarawan [Belanda] Prof. Dr. Remco Raben, istilah 'bersiap' seharusnya tidak diartikan sebagai istilah tetap untuk menandai seluruh masa 1945-1946. Namun itu sering terjadi dan sifatnya rasis. Dia mengatakan, saya kutip, "Istilah 'bersiap' diciptakan dalam konteks kolonial dan digunakan sebagai konsep esensial untuk menggambarkan pengalaman Belanda. Maka 'bersiap' bukanlah istilah yang netral, tetapi ia digunakan berdasarkan pada perspektif Belanda dan Hindia-Belanda."

Raben juga mengatakan: "Itu adalah istilah etnosentris yang menggambarkan hierarki dalam konteks kolonial dan kita menyebutnya hierarki yang rasis." Dengan tafsir penggunaan istilah 'bersiap' (yang juga disebarkan oleh orang Belanda), kita melihat bahwa tak hanya orang Indonesia dan K.U.K.B. tetapi juga banyak orang Belanda mengalami kesulitan. Sayangnya, tak ada ruang bagi pandangan ini dalam debat publik di Belanda tentang dekolonisasi karena debat ini didominasi oleh orang Belanda kulit putih dan orang Hindia-Belanda dan (keturunan) bekas kelompok yang bertikai, yang [memasukkan konsep 'bersiap' karena mereka] tak ingin digambarkan sebagai pihak yang jahat. Jenderal militer percaya bahwa pendudukan negara lain bukanlah pelanggaran HAM.

Dalam pertemuan dengan Rijksmuseum, kami memberikan saran pada mereka untuk tidak memasukkan konsep 'bersiap' dalam pameran, karena penggunaan istilah ini menghina kelompok orang Indonesia. Lagi pula dari sudut pandang orang Indonesia, 'bersiap' adalah istilah buatan Belanda untuk menggambarkan masa tertentu dan memojokkan orang Indonesia. Dari perspektif orang-orang yang menggunakan istilah ini, kami [orang Indonesia] adalah orang yang haus darah yang melakukan kejahatan kemanusiaan pada orang Belanda, Hindia Belanda dan Maluku karena bekerja sama dengan penjajah Belanda. Rijksmuseum berjanji untuk mempertimbangkan masukan kami, namun kemudian mereka mengabaikannya.



## Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden

Foundation the Dutch Debt of Honor Committee

### Gugatan Dida Pattipilohy

Dalam sebuah artikel di harian Belanda NRC, kurator tamu dari Indonesia (Bonnie Triyana) juga bicara menentang penggunaan istilah 'bersiap'. Namun, karena tekanan asosiasi Hindia Belanda (FIN), yang bereaksi marah dan atas nama komunitas Hindia Belanda di Belanda, menuntut istilah 'bersiap' harus tetap dimasukkan di pameran. Rijksmuseum kemudian berbalik mengubah keputusannya.

Kenapa Rijksmuseum lebih mendengarkan orang Hindia-Belanda daripada orang Indonesia? Laporan polisi FIN terhadap Bonnie Triyana juga memutarbalikkan masalah: kelompok keturunan pendukung penjajah yang menindas, melaporkan keturunan orang yang tertindas ke polisi Belanda.

Ini jelas menggambarkan adanya relasi kuasa yang timpang, hierarki kolonial yang masih mencerminkan komposisi masyarakat Belanda, termasuk debat yang terjadi di dalamnya. Hal ini sangat mengingatkan pada rasisme yang dirasakan oleh ibu saya, yang dulu berpikir dia bisa berenang di kolam di Batavia sebagai pribumi atau disebut juga *inlander*, namun ditolak masuk karena dia tak bisa menikmati hak istimewa orang Hindia-Belanda.

Dengan menggunakan istilah 'bersiap' dalam historiografi Belanda untuk menggambarkan masa kelam, sejarawan Belanda bersalah karena menyalahgunakan istilah itu sebagaimana digambarkan oleh Raben, yang hanya berfungsi membingkai orang Indonesia secara rasial sebagai orang yang haus darah, yang bertindak kriminal dan menyerang untuk membunuh manusia lain. Sebagai individual, orang Belanda, sadar atau tidak, mungkin kadang bersalah karena rasisme. Namun bila orang seperti Stevens dan Dibbits, yang memikul tanggung jawab untuk merefleksikan sejarah yang benar, juga bersalah karena penyalahgunaan istilah ini, maka mereka adalah representasi masyarakat yang rasial di mana suara dari orang yang dulu tertindas (orang Indonesia) tidak didengar.

Ini sangat penting untuk diperbaiki. Terima kasih.

---

Gugatan sejarawan Marjolein van Pagee, penasihat K.U.K.B., 13 Oktober 2022.

Yang terhormat para penasihat hukum,

Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang sejarawan, tetapi juga cucu dari seorang laki-laki Belanda yang dikirim ke Indonesia sebagai tentara antara tahun 1947-1949. 10 tahun lalu, ini menjadi alasan bagi saya untuk memulai penelitian sejarah saya. Hari ini saya di sini sebagai penasihat independen dari Komite Utang Kehormatan Belanda (Yayasan K.U.K.B.), satu-satunya yayasan di Belanda yang membela hak-hak korban orang Indonesia atas kejahatan perang Belanda.



# Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden

Foundation the Dutch Debt of Honor Committee

## Gugatan Marjolein van Pagee

Di pengadilan hari ini, kami tak hanya mempermasalahkan sebuah kata, tetapi lebih dari itu ada makna di balik kata tersebut, yang dianggap menyerang. Dalam Bahasa Indonesia 'siap' atau 'bersiap' adalah sebuah kata seperti halnya kata lain. Sifat menyerang dari istilah tersebut ada dalam makna khusus yang melekat padanya dalam konteks Belanda. Dengan istilah ini, orang-orang Belanda atau disebut juga orang-orang Hindia-Belanda merujuk pada kekerasan yang dilakukan mereka yang terjajah untuk melawan Belanda. Karena Belanda dan kelompok kaki tangannya adalah pelaku ketidakadilan, istilah ini berada dalam relasi kekuasaan yang timpang. Sederhananya kata 'bersiap' dalam arti Belanda adalah tuduhan pada para korban yang berubah menjadi pelaku.

Sungguh luar biasa karena dua orang Indonesia bisa bersaksi hari ini. Meskipun populasi Indonesia sekarang mencapai lebih dari 270 juta, tak banyak orang di Belanda yang mengidentifikasi dirinya sebagai 'orang Indonesia.'

Yang cukup mencolok sekarang adalah kelompok orang Hindia-Belanda dan komunitas Maluku: orang-orang yang berhubungan dengan penjajah atau sebagai kaki tangannya. Itulah kenapa suara mereka yang tertindas tak terdengar di Belanda.

Pertama-tama saya ingin menekankan bahwa Yayasan K.U.K.B. menyayangkan bahwa kasus ini harus berlangsung sejauh ini sampai kami berdiri di sini hari ini. Seandainya terdakwa mau mendengar kritik yang disampaikan oleh K.U.K.B. dalam pertemuan personal, maka K.U.K.B. tak akan melaporkannya ke polisi.

Saya bisa memahami bahwa jaksa pertama kali menemukan topik ini yang seharusnya didiskusikan dalam masyarakat, memang begitu idealnya. Namun seperti yang saya katakan tadi, masalahnya adalah orang-orang Indonesia tak dianggap di Belanda.

Poin yang sangat penting adalah bahwa Stevens dan juga Dibbits, tahu tentang masalah istilah itu sebelumnya. Kenapa mereka tak melakukan apa pun dengan pengetahuan ini?

Pada Juni 2021, Jeffry Pondaag dan Dida Pattipilohy, bersama dengan nenek Francisca Pattipilohy, bertemu di Rijksmuseum. Itu setelah Pondaag mengkritik pameran tentang perbudakan, setelah itu Stevens mengundangnya.

Rencana pameran 'Revolusi' telah didiskusikan dengan panjang lebar selama pertemuan ini. Penggugat menjelaskan padanya ada masalah dengan konsep Belanda tentang 'bersiap'. Sekali lagi dan lagi, mereka menekankan 350 tahun penjajahan Belanda yang mendahului kemerdekaan Indonesia 1945 dan penjajahan kembali dengan perang berdarah yang menjadi cara Belanda bereaksi terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia.



## Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden

Foundation the Dutch Debt of Honor Committee

### Gugatan Marjolein van Pagee

Selama 'periode bersiap', sudah ada negara yang merdeka dan berdaulat: Republik Indonesia yang tak diakui Belanda sampai hari ini. Dari sudut pandang hukum, Belanda masih bertahan dengan penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Namun meskipun hukum pidana Belanda memuat ketentuan ini, bukan berarti ini sah. Orang bisa melihat ini sebagai klaim sepihak. Kepulauan Indonesia tak pernah menjadi properti legal Belanda. Saya penasaran, ketika orang-orang di Belanda mendiskusikan perang antara tahun 1945 dan 1946: bagaimana kita benar-benar melihat istilah yang disebut 'pelaku bersiap'? Tampaknya bukan sebagai orang Indonesia, orang-orang dengan kebangsaan Indonesia, tetapi sebagai 'subjek.' Bagaimana pun juga, menurut hukum internasional, Belanda tak pernah menjadi pemilik sah dari tanah air itu.

Namun pengakuan atas konteks yang lebih luas – 350 tahun penjajahan Belanda – tak bisa menjadi penyangkalan untuk tetap menggunakan istilah ini. Konteks yang lebih besar menjelaskan dengan tepat kenapa seluruh konsep ini bersifat menyerang. Faktanya, 'bersiap' sebagai periode itu tidak ada, tak ada peristiwa yang terisolasi dalam masa kekerasan sepihak. Di masa yang sama ketika Belanda mengklaim bahwa ada masa 'bersiap', kota Surabaya dibom oleh rekan sekutu kita, Inggris, yang membunuh ribuan orang. Sederhananya, meskipun Rijksmuseum menyebutkan sejarah 350 tahun penjajahan, ini tetap tak mengubah fakta bahwa keseluruhan konsep 'bersiap' itu bersifat menyerang. Istilah ini tak begitu menyerang ketika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni ide tentang penjajahan itu sendiri.

Dan saya menjamin: konsep 'bersiap' tak ada di Indonesia. Ia berasal dari masa pasca perang Belanda, yang digunakan oleh kelompok pro penjajah yang begitu kecewa bahwa kekuasaan penjajah telah runtuh. Istilah itu merepresentasikan emosi mereka yang campur aduk yang menjadi bagian dari sistem penindasan, meskipun mereka tak mengakuinya, dan bahkan kaget dengan kekerasan orang Indonesia yang melawan mereka.

Argumen utama saya bahwa 'bersiap' adalah konsep Belanda, yang menjadikannya bukan istilah yang netral. Maka dari itu, saya membantah pernyataan jaksa penuntut umum bahwa 'bersiap' tak serta merta mengandung kesimpulan negatif tentang orang Indonesia sebagai kelompok. Argumen jaksa bahwa sejarawan menggunakan istilah itu untuk menamai periode sejarah tak begitu meyakinkan karena jaksa bicara hanya tentang sejarawan Belanda, yang tak dididik dengan tradisi kolonial yang mana banyak dari mereka yang mempromosikan istilah itu. Istilah itu tak bisa dijelaskan dalam beberapa perspektif yang berbeda.

Jaksa penuntut umum tetap mempertahankan istilah 'bersiap' yang bisa ditafsirkan dengan beberapa sudut pandang, yang mana jaksa menghilangkan sifat menyerang yang terkandung dalam kata itu dan menganggapnya hanya sebagai opini.





## Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden

Foundation the Dutch Debt of Honor Committee

### Gugatan Marjolein van Pagee

Pendapat bahwa penjajahan itu ilegal dan berakar pada pelanggaran hak asasi manusia yang parah seharusnya menjadi titik pusat untuk menafsirkan segala yang terjadi dalam konteks tersebut. Tak mungkin bicara tentang dua pihak yang setara. Saya mengunjungi Indonesia berkali-kali dan saya bisa mengatakan pada Anda: pada jutaan orang di sana, kita sama dengan Jerman: mantan penjajah yang merampas tanah. Saya mengatakan ini karena kita tak hanya bicara tentang opini individu yang kebetulan bernama Pondaag atau Pattipilohy.

Namun ini lebih jauh daripada perspektif Belanda dengan Indonesia. Ini bukan hanya opini Belanda sebagai penjajah dan pelanggar hak asasi manusia, ini adalah fakta. Resolusi PBB yang penting menyatakan bahwa penjajahan adalah penyangkalan paling dasar terhadap hak asasi manusia.

Dengan kerangka hukum internasional yang jelas tersebut, ini jadi masalah ketika seseorang menolak untuk mengambil posisi. Paling tidak sikap itu berarti menerima kejahatan dan bila saya lebih tegas: tak mengambil posisi adalah menolak bahwa kejahatan ini salah.

Selama pertemuan tahun 2021, kurator Stevens mengatakan bahwa Rijksmuseum perihal kejahatan perang Belanda: 'tentu tak berpihak.' Menurutnya karena museum memiliki hubungan langsung dengan pemerintah Belanda. Ini seperti alasan yang mencegahnya untuk membuat pilihan antara benar dan salah.

Maka apakah ini benar-benar netral dengan tak menilai kejahatan perang Belanda terhadap orang Indonesia? Bagaimana jika kurator Belanda ini mengatakan: 'Saya tak bisa mengambil posisi pada Holocaust, saya tak bisa mengatakan itu benar atau salah.'

Ketika kita mempertimbangkan dari perspektif legal, penjajahan sama sekali tak bisa diterima, bagaimana bisa disebut netral jika tetap menggunakan kata 'bersiap'? Karena inilah yang menjadi alasan mengapa kami di sini hari ini: Rijksmuseum mengabaikan saran dari orang Indonesia.

Pertemuan pada Juni 2021 bukanlah satu-satunya pertemuan tim Rijksmuseum saat menerima peringatan dari orang-orang Indonesia. Telah diketahui bahwa kurator tamu Bonnie Triyana menjelaskan dalam tulisan editorial bahwa 'bersiap' itu istilah rasis. Tulisannya membuat gempar. Sebuah ilustrasi tentang representasi yang timpang tentang orang Indonesia dalam masyarakat kita, keturunan dari mereka yang bekerja sama dengan penjajah melaporkan kasus Bonnie Triyana pada polisi. Apa reaksi Rijksmuseum? Benar, Dibbits di depan publik mengambil sikap menjauhkan diri dari Triyana dan mengklaim bahwa penggunaan istilah 'bersiap' tak sepenuhnya rasis.



# Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden

Foundation the Dutch Debt of Honor Committee

## Gugatan Marjolein van Pagee

Tampaknya, direktur dan kurator Rijksmuseum telah berpihak.

Alasan kenapa Yayasan K.U.K.B. memutuskan untuk turut melaporkan kasus ini ke polisi ada dua. Pertama, fakta bahwa kontribusi Yayasan K.U.K.B. telah sepenuhnya diabaikan. Namun yang kedua, mereka juga memperlakukan reaksi Dibbits tentang laporan polisi oleh Federasi Orang Hindia-Belanda (FIN). Di sinilah sakit hati itu: Dibbits lebih mendengarkan orang-orang Hindia-Belanda dengan gagasan kolonial secara terbuka daripada orang Indonesia yang menyebutnya rasis.

Bagi K.U.K.B., ini adalah penghinaan lagi karena telah membalikkan kebenaran. Kebenaran, betapa pun kontroversialnya, menarik juga bagi kita, orang Belanda. Kebenaran yang tak menyenangkan yang sekarang juga meminta sesuatu dari Anda sebagai hakim.

Kebenaran dan keadilan sangat berkaitan. Sesuatu terjadi atau tak terjadi. Kebenaran tak selalu berada di antara, tentu saja tidak bila itu berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Saya paham bahwa yang mulia hakim berusaha senetral mungkin, tapi yang mulia juga tahu bahwa berbicara keadilan adalah tentang membuat pilihan. Apa pun keputusan yang mulia nanti, yang mulia akan mengambil posisi. Kami memohon yang mulia untuk melakukan sesuatu yang tak biasa dalam konteks Belanda. Meskipun kolonialisme secara umum adalah hal normal di negara kita, penjajahan itu tetap tak berarti legal.

Bagi Yayasan K.U.K.B, peristiwa yang melingkupi siaran pers pada akhir Januari lalu adalah serangkaian hal buruk yang mengecewakan dan membuat marah. Inilah alasan bahwa masalah ini tak bisa diselesaikan dengan cara berbicara dalam masyarakat, karena Rijksmuseum tak mau mendengarkan dan ini menjelaskan kenapa kasus ini sampai ke meja yang mulia.

Terlebih, prosedur legal juga bisa menjadi debat publik dalam masyarakat. Seperti serangkaian gugatan hukum K.U.K.B. yang sukses yang diluncurkan atas nama keluarga korban Indonesia yang mengisi debat tentang kejahatan perang Belanda di Indonesia. Faktanya, pameran revolusi juga mengambil untung dari perhatian pada topik ini yang menjadi agenda kasus pengadilan K.U.K.B. Betapa tidak adilnya ini, bahwa Rijksmuseum mengabaikan kontribusi yang jelas dari Yayasan ini.

---